

4	... diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ... untuk ...	... teknologi untuk metode dan ...	Pimpinan: ... ikut perkembangan ... yang untuk peningkatan kompetensi diri dan ...
5	... untuk berkontribusi Terbuka dengan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ... untuk ...	Klausur Pimpinan: - Memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk ide atau ...	... tersebut ... kita harus bijaksana terhadap ide/ gagasan ini dari bawah kita
DAFTAR PUSTAKA ... dan dan			

Jombang, 31 Maret 2023

Pemilik Kinerja





DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI

PERIODE: TRIWULAN MELAYU AKHIR

KECAMATAN TEMBELANG

PERIODE PENILAIAN:

01 JANUARI SD 31 MARET TAHUN 2023

1. PEGAWAI YANG DINILAI	
NAMA	AGUS SANTOSO, S.Sos.
NIP	197303291992011001
PANGKAT/GOL. RUANG	PEMBINA/ IV-a
JABATAN	CAMAT
UNIT KERJA	KECAMATAN TEMBELANG
2. PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Drs. PURWANJO, M.KP
NIP	196612061989021002
PANGKAT/GOL. RUANG	PEMBINA UTAMA MUDA/ IV-c
JABATAN	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
UNIT KERJA	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
3. ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	AGUS PURNOMO, S.H., M.Si
NIP	197207101998031010
PANGKAT/GOL. RUANG	PEMBINA UTAMA MUDA/ IV-c
JABATAN	SEKRETARIS DAERAH
UNIT KERJA	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
4. EVALUASI KINERJA	
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	BAIK
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	BAIK
5. CATATAN/REKOMENDASI	

Jombang, 31 Maret 2023

7. Pegawai yang Dinilai


NIP 197303291992011001

Jombang, 31 Maret 2023

6. Pejabat Penilai Kinerja


196612061989021002

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

1 NAMA : AGUS SANTOSO, S.Sos
2 NIP : 197303291992011001
3 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA/ IV-a
4 JABATAN : CAMAT
5 UNIT KERJA : KECAMATAN TEMBELANG

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	NO	TRIBUNAN 1		NO	TRIBUNAN 2		NO	TRIBUNAN 3		NO	TRIBUNAN 4	
				RENCANA AKSI	TARGET		RENCANA AKSI	TARGET		RENCANA AKSI	TARGET		RENCANA AKSI	TARGET
1	Pengimplementasian SAKIP yang membudaya di Kecamatan Tembelang	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Tembelang	1	Melaksanakan evaluasi penilaian AKIP tahun n-1	1 kegiatan	1	Supervisi dalam implementasi sakip di Kecamatan Tembelang	3 kegiatan	1	Mengkoordinasikan kelengkapan dokumen SAKIP sebagai bahan evaluasi	1 kegiatan	1	Mengevaluasi hasil evaluasi sakip awal	1 kegiatan
			2	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan nilai AKIP	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan dan monitoring implementasi SAKIP mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	3 kegiatan	2	Pemaparan implementasi SAKIP Kecamatan Tembelang	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholder untuk perbaikan dokumen sakip	1 kegiatan
			3	Mengkoordinasikan dan monitoring implementasi SAKIP mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	3 kegiatan	3	Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan evaluasi sakip dengan Inspektorat dan Bagian Organisasi	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan evaluasi sakip dengan Inspektorat dan Bagian Organisasi	1 kegiatan
			4	Evaluasi kinerja pegawai dalam pencapaian target kinerja	1 kegiatan	4	Penerapan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja pegawai	1 kegiatan	4	Penerapan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja pegawai	1 kegiatan	4	Penerapan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja pegawai	1 kegiatan
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan Kecamatan Tembelang	IKM Kecamatan Tembelang	1	Melaksanakan evaluasi hasil penilaian IKM n-1	1 kegiatan	1	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1 kegiatan	1	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1 kegiatan	1	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1 kegiatan
			2	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IKM Kecamatan	1 kegiatan	2	Mengevaluasi komponen penilaian IKM yang perlu ditingatkan	1 kegiatan	2	Mengevaluasi hasil penilaian IKM SMT 1	1 kegiatan	2	Menyelia pelaksanaan pelayanan di Kecamatan	1 kegiatan
			3	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penilaian IKM	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan dengan stakeholder terhadap perbaikan komponen penilaian IKM	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan dengan stakeholder terhadap perbaikan komponen penilaian IKM	1 kegiatan	3	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	1 kegiatan
			4	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1 kegiatan	4	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	1 kegiatan	4	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	1 kegiatan	4	Monitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan survey IKM	1 kegiatan
3	Meningkatnya pelayanan publik sesuai standar	IPP KecamatanTembelang	1	Melaksanakan evaluasi hasil penilaian IPP n-1	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan dengan stakeholder dokumen pendukung penilaian IPP Smt 1	1 kegiatan	1	Mengevaluasi hasil penilaian IPP Smt 1	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan dengan stakeholder dokumen pendukung penilaian IPP Smt 2	1 kegiatan
			2	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IPP Kecamatan	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan dengan bagian Organisasi pelaksanaan penilaian IPP	1 kegiatan	2	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IPP Kecamatan Tembelang	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan dengan bagian Organisasi pelaksanaan penilaian IPP	1 kegiatan
			3	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penilaian IPP	1 kegiatan	3	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penilaian IPP	1 kegiatan	3	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	1 kegiatan
			4	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	1 kegiatan	4	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	1 kegiatan	4	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	1 kegiatan	4	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	1 kegiatan
4	Tindakanjut pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan

			2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan
			4	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3 kegiatan	4	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3 kegiatan	4	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3 kegiatan	4	Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3 kegiatan
5	Pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	1	Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes 2022	15 desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	15 desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	15 desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	15 desa
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	15 desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	15 desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	15 desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	15 desa
			3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	15 desa	3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	15 desa	3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	15 desa	3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	15 desa
			4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	15 desa	4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	15 desa	4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	15 desa	4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	15 desa
6	Evaluasi Raperdes APBDesa/ Perubahan APB Desa Tepat waktu	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	15 desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	15 desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes	15 desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes	15 desa
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	15 desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	15 desa	2	Monitoring pelaksaasn musdes raperdes	15 desa	2	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan Raperdes APBDeS	15 desa
			3	Supervisi dalam penyusunan pelaksanaan APBDes yang sesuai aturan	15 desa	3	Supervisi dalam penyusunan pelaksanaan APBDes yang sesuai aturan	15 desa				3	Mengevaluasi raperdes APBDes tepat waktu	15 desa

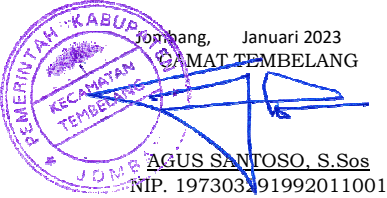
NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	NO	TRIBUNAN 1		NO	TRIBUNAN 2		NO	TRIBUNAN 3		NO	TRIBUNAN 4	
				RENCANA AKSI	TARGET		RENCANA AKSI	TARGET		RENCANA AKSI	TARGET		RENCANA AKSI	TARGET
1	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	1	Mengevaluasi capaian kinerja tahun n-1	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan capaian kinerja tribulan 2	1 kegiatan	1	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IKM Kecamatan Ngoro	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan capaian kinerja tribulan 3	1 kegiatan
			2	Menentukan langkah dn strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	1 kegiatan	2	Menentukan langkah dn strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penilaian IKM	1 kegiatan	2	Menentukan langkah dn strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	1 kegiatan
			3	Mengkoordinasikan penetapan target kinerja aparatur, IKU dan IKI	1 kegiatan	3	Menyelia dan motoring kinerja aparatur	1 kegiatan	3	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1 kegiatan	3	Menyelia dan motoring kinerja aparatur	1 kegiatan
			4	Mengkoordinasikan rencana aksi dalam pencapaian target kinerja	1 kegiatan	4	Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja	1 kegiatan	4	Melaksanakan evaluasi hasil penilaian IPP n-1	1 kegiatan	4	Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja	1 kegiatan
			5	Melakukan evaluasi kinerja tribulan 1	1 kegiatan	5	Melakukan evaluasi kinerja tribulan 2	1 kegiatan	5	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IPP Kecamatan Ngoro	1 kegiatan	5	Melakukan evaluasi kinerja tribulan 3	1 kegiatan
2	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	1	Melaksanakan evaluasi hasil penilaian Paten n-1	1 kegiatan	1	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung penilaian IPP	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan persiapan penilaian PATEN	1 kegiatan

			2	Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan Nilai PATEN Kecamatan Ngoro	1 kegiatan	2	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	1 kegiatan	2	Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	1 kegiatan	2	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	1 kegiatan
			3	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, kompetensi petugas penilaian PATEN	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan perbaikan sarana dan prasarana pendukung, kompetensi petugas penilaian PATEN	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan evaluasi PATEN dengan bagian pemerintahan	1 kegiatan	3	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	1 kegiatan
			4	Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	1 kegiatan				4	Mengkoordinasikan persiapan penilaian PATEN	1 kegiatan	4	Mengevaluasi hasil penilaian PATEN	1 kegiatan
3	Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan				1	Mengkoordinasikan persiapan pelaksaan kegiatan Ramadhan	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan acara PHBN/ PHBA (HUT RI)	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan acara PHBN/ PHBA (Hari Santri)	1 kegiatan
					2	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Ramadhan	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan pelaksanaan peringatan PHBN/ PHBA	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan pelaksanaan peringatan PHBN/ PHBA	1 kegiatan	1 kegiatan
					3	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Ramadhan	1 kegiatan	3	Mengevaluasi pelaksanaan acara PHBN/PHBA	1 kegiatan	3	Mengevaluasi pelaksanaan acara PHBN/PHBA	1 kegiatan	1 kegiatan
4	Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	1	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan	1	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan	1	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan	1	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan
			2	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pemerintahan umum	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan	1 kegiatan
			4	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan	4	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan	4	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi	1 kegiatan	4	Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi	1 kegiatan
5	Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	1	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan
			2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	2	Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan
			3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3	Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan
6	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	1	Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes 2022	15 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	15 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	15 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	15 Desa
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	15 Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	15 Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	15 Desa	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	15 Desa
			3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	15 Desa	3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	15 Desa	3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	15 Desa	3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	15 Desa

			4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	15 Desa	4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	15 Desa	4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	15 Desa	4	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	15 Desa
7	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksaan APBDes	15 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksaan APBDes	15 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksaan APBDes	15 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksaan APBDes	15 Desa
			2	Mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes	15 Desa	2	Mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes	15 Desa	2	Mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes	15 Desa	2	Mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes	15 Desa
			3	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	15 Desa	3	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	15 Desa	3	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	15 Desa	3	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	15 Desa
			4	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	4	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	4	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	4	Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	1 kegiatan
8	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi	1	Mengkoordinasikan pelaksanaan Perdes tahun n yang telah disusun	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan pelaksanaan Perdes tahun n yang telah disusun	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes	15 Desa	1	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes	15 Desa
			2	Menyelia pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	2	Menyelia pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	2	Monitoring pelaksaasn musdes raperdes	15 Desa	2	Monitoring pelaksaasn musdes raperdes	15 Desa
									3	Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan Raperdes APBDes	15 Desa	3	Menyelia penyusunan Raperdes	15 Desa
									4	Supervisi dalam penyusunan raperdes APBDes yang sesuai aturan	15 Desa	4	Mengevaluasi raperdes APBDes tepat waktu	15 Desa
9	Koordinasi dan pembinaan lembaga/ badan usaha Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	1	Mengkoodinasikan pembinaan PKK	15 TP-PKK	1	Mengkoodinasikan pembinaan PKK	15 TP-PKK	1	Mengkoodinasikan pembinaan PKK	15 TP-PKK	1	Mengkoodinasikan pembinaan PKK	15 TP-PKK
			2	Mengkoordinasikan pembinaan BUMDes	15 BUMDes	2	Mengkoordinasikan pembinaan BUMDes	15 BUMDes	2	Mengkoordinasikan pembinaan BUMDes	15 BUMDes	2	Mengkoordinasikan pembinaan BUMDes	15 BUMDes
			3	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan	3	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan	3	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK	4 kegiatan	3	Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK	4 kegiatan
			4	Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan	4	Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan	4	Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan	4	Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan

ATASAN LANGSUNG

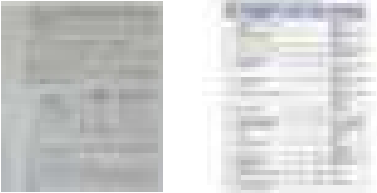
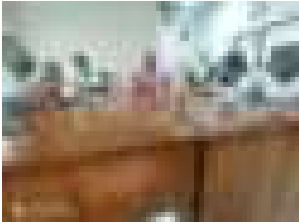
HJj. MUNDIIDAH WAHAB

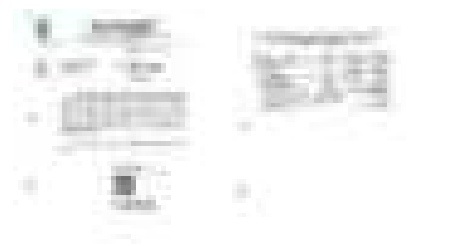
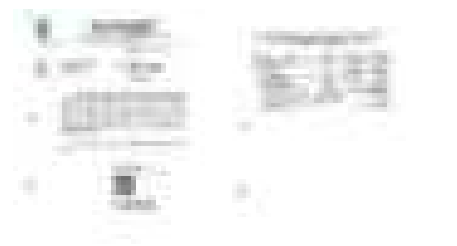


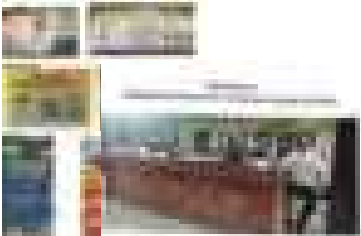
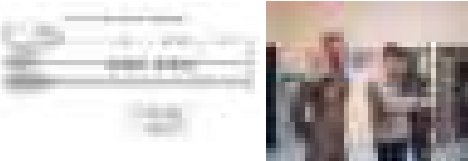
Jombang, Januari 2023
 AGUS SANTOSO, S.Sos
 NIP. 197303191992011001

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TRIBUNAL IV TAHUN 2023

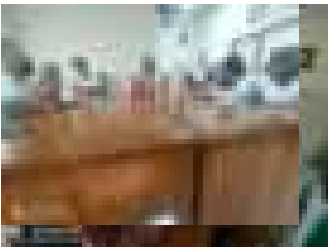
1 NAMA : AGUS SANTOSO, S.Sos
2 NIP : 197303291992011001
3 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA/IV-a
4 JABATAN : CAMAT
5 UNIT KERJA : KECAMATAN TEMBELANG

NO	KINERJA	DIKATOR KINERJA INDIVIDUAL	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Pengimplementasian SAKIP yang membudaya di Kecamatan Tembelang	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Tembelang	Mengevaluasi hasil evaluasi sakip awal	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah dilakukan hasil evaluasi sakip tahun 2023	Telah dilakukan hasil evaluasi SAKIP tahun 2023, dimana hasil evaluasi SAKIP adalah 72,99 dengan target 72,01 dengan capaian 102,36. Dari hasil penilaian tim AKIP komponen yang perlu dilakukan perbaikan adalah pelaporan kinerja, dari 15% hanya tercapai 6,89%	Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 
			Mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholder untuk perbaikan dokumen sakip	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah dikoordinasikan dengan seluruh stakeholder untuk perbaikan dokumen SAKIP	Komponen yang perlu dilakukan perbaikan secara maksimal adalah komponen pelaporan kinerja dari bobot 15% hanya tercapai 6,89% dengan tingkat capaian 45,95% (D). Akan dilakukan perbaikan berupa 1. laporan kinerja menginfokan upaya dan hambatan secara spesifik kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan 2. Menambahkan informasi efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai dalam laporan kinerja 3. Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja	Rapat Koordinasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 
			Mengkoordinasikan evaluasi sakip dengan Inspektorat dan Bagian Organisasi	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah dikoordinasikan dengan evaluator SAKIP	Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan evaluator SAKIP terkait perbaikan dokumen-dokumen SAKIP. Per tanggal 28 September semua dokumen SAKIP telah diperbaiki sesuai arahan tim evaluator dan telah diupload ke https://drive.google.com/drive/folders/13YcnXMbdrWIKRqzUOSVAYS0UJKf63ZOt/ups=sharing	Tindak lanjut atas evaluasi SAKIP tahun 2023 telah ditindaklanjuti 

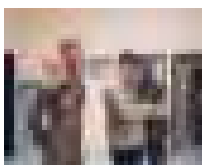
			Penerapan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja pegawai	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah diterapkan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja pegawai	Telah dikoordinasikan penghitungan disiplin dan kinerja pegawai sebagai dasar pemberian reward dan punishmen	SK Pemberian Reward dan Punishment 
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan Kecamatan Tembelang	IKM Kecamatan Tembelang	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah disosialisasikan dan diinformasikan penilaian IKM kepada masyarakat	Mensosialisasikan dan menginformasikan penilaian IKM kepada masyarakat di ruang pelayanan	http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/ZWZncEx3cW5UWUJyZ1c3ek1ZR2RVUT09 
			Menyelia pelaksanaan pelayanan di Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah dievaluasi komponen penilaian IKM yang perlu ditingkatkan	Dalam perbaikan nilai IKM tahun 2023 akan dilakukan upaya sebagai berikut: 1.Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas pelayanan dalam rangka monitoring dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh pemda Kab. Jombang 4. Pada PAK 2023 akan dilaksanakan pembangunan Jalur disabilitas khusus pelayanan tempat parkir untuk pelayanan	
			Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah dikoordinasikan dengan stakeholder terhadap perbaikan komponen penilaian IKM	Mengkoordinasikan pada stakeholder petugas pelayanan untuk peningkatan nilai IKM. Hasil IKM Kec. Tembelang adalah 95,36 melebihi target yang ditetapkan yaitu 88,85	Hasil IKM Kecamatan Tembelang 
			Monitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan survey IKM	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah dilakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	Telah dilakukan pemantauan kinerja stakeholder pelayanan secara rutin	Monitoring kinerja petugas pelayanan 
3	Meningkatnya pelayanan publik sesuai standar	IPP KecamatanTembelang	Mengkoordinasikan dengan stakeholder dokumen pendukung penilaian IPP Smt 2	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah dikoordinasikan dengan stakeholder dokumen pendukung penilaian IPP Smt 2	Untuk meningkatkan nilai IPP pada tahun 2023 akan dilakukan beberapa alternatif perbaikan pada beberapa aspek penilaian IPP yaitu: Aspek Kebijakan Pelayanan Informasi SKM agar dipublikasikan diarea ruang pelayanan, media	Penerapan rewad dan punishment pelaksana pelayanan yang didasarkan pada penilaian masyarakat terhadap pengguna layanan melalui http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/ZWZncEx3cW5UWUJyZ1c3ek1ZR2RVUT09

			Menentukan langkah strategi dalam meningkatkan IPP Kecamatan Tembelang	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah dikoordinasikan dengan bagian Organisasi pelaksanaan penilaian IPP	informasi, media sosial dan media cetak Aspek Profesionalisme SDM - Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoing dan peningkatan kinerja pelayanan. Aspek Sarana dan Prasarana - Direncanakan pada PAK 2023 akan dilaksanakan pembangunan sarana jalur disabilitas. Konsultasi dan Pengaduan - Arsip proses konsultasi terdokumentasi dan mudah diakses di website, dokumen/arsip lainnya	
			Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	Telah dikoordinasikan dengan Tim Anggaran untuk pengajuan anggaran pembangunan Parkir pada PAK 2022	Bukti terlampir surat pengajuan anggaran pembuatan aspal 
			Menyelia pelaksanaan pelayanan publik	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelayanan publik	Memantau dan monitoring pelaksanaan pelayanan publik secara rutin di Kecamatan Tembelang. Untuk memantau kinerja dan memberikan apresiasi pada petugas pelayanan dilaksanakan penilaian kinerja petugas PATEN	http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/ZWZncEx3cW5UWUJyZ1c3ek1ZR2RVUT09
4	Tindakanjut pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Telah dilakukan deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Dilakukan deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan trantibum, koordinasi permasalahan, strategi, evaluasi serta tindak lanjutnya dengan instansi terkait secara berkala	Laporan kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum TB IV 
			Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Telah dilakukan koordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait		Laporan kegiatan pengamanan Kantor dan kegiatan TB IV 
			Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Telah dilakukan koordinasi strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum		Laporan patroli penegakkan perda/perkada TB IV 

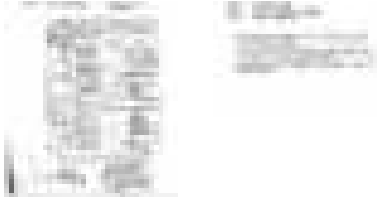
			Mengevaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Telah dilakukan evaluasi dan menyelia tindak lanjut pelanggaran perda dan trantibum		 
5	Pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	15 desa	15 desa	100%	Telah dikoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	Mengkoordinasikan dengan Kasi Tata Pemerintahan untuk dilaksanakan pembinaan pelaksanaan APBDes dan persiapan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes SMT 1 dan LRA akhir tahun.	Rapat Koordinasi pembinaan APBDes 2023 
			Menyelia pelaksanaan APBDes	15 desa	15 desa	100%	Telah dilakukan monitoring pelaksanaan APBDes	Telah dilakukan monitoring pelaksanaan APBDes ke desa-desa (15 desa di Kecamatan Tembelang)	Jadwal Monev ke desa-desa dan foto 
			Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	15 desa	15 desa	100%	Telah dikoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	Dilakukan pendampingan oleh Kasi Tata Pemerintahan dan Kasi PMD terkait penyusunan pertanggungjawaban APBDes LRA SMT 1	Rekapitulasi Laporan pertanggungjawaban APBDes LRA SmT 1  
			Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	15 desa	15 desa	100%	Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan LRA Semester 1	Melakukan moitoring dan evaluasi penyusunan pertanggungjawaban APBDes (LRA SMT 1)	
6	Evaluasi Raperdes APBDesa/ Perubahan APB Desa Tepat waktu	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes	15 desa	15 desa	100%	Telah dikoordinasikan dengan Kasi PMD untuk dilaksanakan pembinaan Raperdes RKPDes 2023	Berkoordinasi dengan Kasi PMD untuk pembinaan dan pendampingan penyusunan Raperdes RKPDes Tahun 2023	Dokumen musdes dan jadwal musdes  
			Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan Raperdes APBDes	15 desa	15 desa	100%	Telah dimonitoring pelaksaasn musdes raperdes	Monitoing pelaksanaan APBDes di 15 Desa	
			Mengevaluasi raperdes APBDes tepat waktu	15 desa	15 desa	100%	Telah di supervisi dalam rangka penyusunan raperdes RKP Tahun 2023	Mendukung dan supervisi bersama tim evaluasi administrasi desa untuk mengevaluasi dan memonitoring penyusunan Perdes RKPDes	

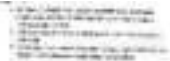
NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Mengkoordinasikan capaian kinerja tribulan 4	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah dikoordinasikan capaian kinerja tribulan 4	Telah dilakukan koordinasikan, evaluasi dan monitoing kinerja untuk menentukan langkah dan strategi dalam pencapaian kinerja dan mencari solusi pemecahan masalah apabila ditemukan permasalahan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan melalui rapat evaluasi internal tribulan	Rapat Evaluasi Internal tribulan 4 
			Menentukan langkah dn strategi dalam peningkatan kinerja aparatur	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah direncanakan langkah dan strategi dalam peningkatan kinerja aparatur		
			Menyelia dan motoring kinerja aparatur	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah dievaluasi dan motoring kinerja aparatur		
			Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah dilakukan Supervisi stakeholder dalam pencapaian kinerja		

			Melakukan evaluasi kinerja tribulan 4	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah dilakukan evaluasi kinerja tribulan 4		BA hasil capaian kinerja tribulan 4
2	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	Mengkoordinasikan persiapan penilaian PATEN	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah dikoordinasikan persiapan penilaian PATEN	Melakukan supervisi terhadap peningkatan nilai PATEN dengan beberapa strategi sebagai berikut: 1. Penambahan sarana dan prasarana pendukung PATEN seperti Jalur disabilitas dan Paten (sudah dianggarkan pada PAPBD 2023)	Usulan pembangunan Paten dan Jalur Disabilitas di setuju tim Anggaran dan akan dilaksanakan pada P-APBDP 2023 (surat) 
			Melakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Telah dilakukan supervisi terhadap stakeholder pelaksana pelayanan	Monitoring petugas pelaksana pelayanan rutin dilaksanakan oleh masyarakat pengguna pelayanan melalui link bit.ly	http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/ZWZncEx3cW5UWUJyZ1c3ek1ZR2RVUT09
			Menyelia pelaksanaan pelayanan PATEN	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Sudah dilakukan monitoring pelaksanaan pelayanan PATEN	Mengkoordinasikan terhadap peningkatan nilai PATEN dengan beberapa strategi sebagai berikut: 1. Penambahan sarana dan prasarana pendukung PATEN seperti area Parkir pelayanan, pembangunan PATEN, Jalus Disabilitas	Usulan pembangunan Paten dan Jalur Disabilitas di setuju tim Anggaran dan akan dilaksanakan pada P-APBDP 2023 (surat) 
			Mengevaluasi hasil penilaian PATEN	1 kegiatan			Belum ada hasil penilaian PATEN	Mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholder kecamatan untuk persiapan pelaksanaan penilaian PATEN	Mengkoordinasikan dengan seluruh stakeholder kecamatan untuk persiapan pelaksanaan penilaian PATEN 

3	Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan acara PHBN/ PHBA (Hari Santri)	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Sudah dikoordinasikan persiapan pelaksaan acara Hari Santri	Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan acara Santri dengan polsek dan koramil dan Instansi terkait	     
			Mengkoordinasikan pelaksanaan peringatan PHBN/ PHBA	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Sudah dikoordinasikan pelaksanaan peringatan PHBN/ PHBA (Hari Santri)	Melngkoordinasikan pelaksanaan acara hasi Santri dengan polsek dan koramil dan Instansi terkait	
			Mengevaluasi pelaksanaan acara PHBN/PHBA	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Sudah mengevaluasi pelaksanaan acara PHBN/PHBA (Hari Santri)	Mengevaluasi hasil pelaksanaan acara Hari Santri dan Instansi terkait	
4	Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	Mengidentifikasi dan deteksi permasalahan urusan pemerintahan umum	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	melaksanakan koordinasi dengan forkopimcam kecamatan Tembelang (Camat, Kapolsek, Danramil)	Pelaksanaan rapat koordinasi Forkopicam dilakukan setiap tribulan	Laporan kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimcam (Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi)
			Mengkoordinasikan permasalahan pemerintahan umum dengan Forkopimcam	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
			Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
			Menindaklanjuti bersama hasil rekomendasi forkopimcam	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
5	Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	Deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Telah dilakukan deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Dilakukan deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan trantibum, koordinasi permasalahan, strategi, evaluasi serta tindak lanjutnya dengan instansi terkait secara berkala	Laporan kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum TB IV 

			Mengkoordinasikan permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Telah dilakukan koordinasi permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait		Laporan kegiatan pengamanan Kantor dan kegiatan TB IV
			Mengkoordinasikan strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Telah dilakukan koordinasi strategi penyelesaian permasalahan pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum		Laporan patroli penegakkan perda/perkada TB IV
6	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes	15 Desa	15 Desa	100%	Sudah dikoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDesa	Telah dikoordinasikan pembinaan pelaksanaan APBDes dalam penyusunan LRA SMT 1	Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes 2022
			Menyelia pelaksanaan APBDes	15 Desa	15 Desa	100%	Sudah dilaksanakan monitoring pelaksanaan APBDes	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDes 2023 SMT 1	
			Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	15 Desa	15 Desa	100%	Sudah dikoordinasikan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban APBdesa	Mengkoordinasikan dengan Kasi Tata Pemerintahan terkait penyusunan LRA SMT 1 APBDesa 2023 SMT I	Rekapitulasi Penetapan LRA SMT 1 Tahun 2022
			Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	15 Desa	15 Desa	100%	Sudah dilakukan Supervisi dalam penyusunan pertanggungjawaban APBDes yang sesuai aturan	Mengkoordinasikan dengan kasi Tata Pemerintahan untuk dilaksanakan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban LRA SMT 1 Tahun 2023	
7	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	Mengkoordinasikan pembinaan pelaksaana APBDes	15 Desa	15 Desa	100%	Telah dikoordinasikan dengan Kasi PMD untuk pembinaan pelaksanaan APBDes	Bersama dengan Kasi PMD dilaksanakan pembinaan pelaksanaan APBDes yang telah ditetapkan dalam Perdes 2023	Rapat Pembinaan APBDes
			Mengkoordinasikan monitoring dan pengawasan pelaksanaan APBDes	15 Desa	15 Desa	100%	Telah dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaan APBDes	Dilaksaaanakan monitoring dan tinjau lapang pelaksanaan APBDes ke desa -desa, serta melalui dokumen SPJ dan pengajuan pencairan dari masing - masing desa	
			Mengevaluasi pelaksanaan APBDes	15 Desa	15 Desa	100%	Evaluasi pelaksanaan APBDes SMT 1 Th. 2022	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes SMT 1 Tahun 2022 melalui tinjau lapang dan dokumen pertanggungjawaban yang telah disusun	

			Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Dikoordinasikan tindak lanjut evaluasi pelaksanaan APBDes SMT 1 Th. 2023	Mengkoordinasikan dengan kasi PMD agar segera ditindaklanjuti oleh Desa apabila ada yng perlu dilakukan perbaikan dokumen pelaksanaan APBDes	
8	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi	Mengkoordinasikan pembinaan penyusunan Raperdes APBDes	15 Desa	15 Desa	100%	Telah dikoordinasikan dengan Kasi PMD untuk pembinaan pelaksanaan APBDes	Bersama dengan Kasi PMD dilaksanakan pembinaan pelaksanaan APBDes yang telah ditetapkan dalam Perdes 2022	Pembinaan Perdes 2022 
			Monitoring pelaksaasn musdes raperdes	15 Desa	15 Desa	100%	Telah dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaan APBDes	Dilaksanakan monitoring dan tinjau lapang pelaksanaan APBDes ke desa -desa, serta melalui dokumen SPJ dan pengajuan pencairan dari masing - masing desa	Rapat koordinasi pelaksanaan APBDes 
			Mengkoordinasikan pendampingan penyusunan Raperdes APBDes	15 Desa	15 Desa	100%	Evaluasi pelaksanaan APBDes SMT 1 Th. 2023	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes SMT 1 Tahun 2023 melalui tinjau lapang dan dokumen pertanggungjawaban yang telah disusun	
			Supervisi dalam penyusunan raperdes APBDes yang sesuai aturan	15 Desa	15 Desa	100%	Dikoordinasikan tindak lanjut evaluasi pelaksanaan APBDes SMT 1 Th. 2022	Mengkoordinasikan dengan kasi PMD agar segera ditindaklanjuti oleh Desa apabila ada yng perlu dilakukan perbaikan dokumen pelaksanaan APBDes	
9	Koordinasi dan pembinaan lembaga/ badan usaha Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Mengkoodinasikan pembinaan PKK	15 TP-PKK	15 TP-PKK	100%	Telah dilaksanakan pembinaan PKK	Pembinaan PKK rutin dilaksanakan hampir setiap bulan sesuai dengan instruksi PKK Kab. Jombang	 
			Mengkoordinasikan pembinaan BUMDes	15 BUMDes	15 BUMDes	100%	Telah dilaksanakan pembinaan BUMDes	Pembinaan BUMDes dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban dan administrasi	 
			Monitoring administrasi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	Telah dimonotoring administrasi PKK dan BUMDes	Monitoring dokumen administrasi PKK dan BUMDes	 

			Menyelia dan supervisi eksistensi lembaga pemberdayaan PKK dan BUMDes	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	Telah di monitoring dan dibina PKK dan BUMDes agar tetap berkembang	Pembinaan PKK dan BUMDes secara rutin agar PKK dan BUMDes semakin berkembang dan aktif		
JUMLAH RATA-RATA CAPAIAN							100%			

ATASAN LANGSUNG

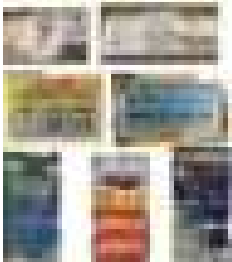
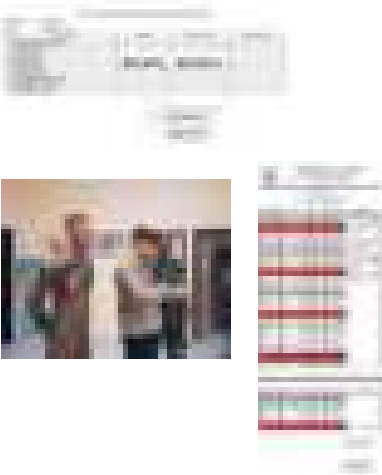
Jombang, 07 Januari 2024
CAMAT TEMBELANG

AGUS SANTOSO, S.Sos
Pembina
NIP. 197303291992031001

PENGUKURAN KINERJA
TRIBUNAL 4 TAHUN 2023

1 NAMA : AGUS SANTOSO, S.Sos
2 NIP : 197303291992011001
3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina/IV a
4 JABATAN : CAMAT
5 UNIT KERJA : KECAMATAN TEMBELANG

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL 1	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI		
1	Pengimplementasian SAKIP yang membudaya di Kecamatan Tembelang	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Tembelang	72,01	72,99	101,36	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.755.553.535	2.287.468.074	83,01%	Telah dilakukan hasil evaluasi sakip tahun 2023	Telah dilakukan hasil evaluasi SAKIP tahun 2023, dimana hasil evaluasi SAKIP adalah 72,99 dengan target 72,01 dengan capaian 102,36. Dari hasil penilaian tim AKIP komponen yang perlu dilakukan perbaikan adalah pelaporan kinerja, dari 15% hanya tercapai 6,89%  
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan Kecamatan Tembelang	IKM Kecamatan Tembelang	88,85	95,36	107,33	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.100.000	2.100.000	100,00%	Sudah terdapat penilaian IKM untuk sementara nilai IKM Kec. Tembelang adalah 95,36	Dalam perbaikan nilai IKM tahun 2023 akan dilakukan upaya sebagai berikut: 1.Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas pelayanan dalam rangka monitoring dan peningkatan kinerja pelayanan 2. Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh pemda Kab. Jombang 4. Pada PAK 2023 akan dilaksanakan pembangunan Jalur disabilitas khusus pelayanan tempat parkir untuk pelayanan 
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					

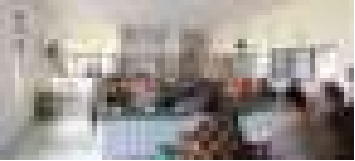
3	Meningkatnya pelayanan publik sesuai standar	IPP KecamatanTembelang	3,50	3,61	103,14	3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.100.000	2.100.000	100,00%	Sudah terdapat penilaian IPP untuk sementara nilai IPP Kec. Tembelang adalah 3,61	Sudah dilaksanakan hasil evaluasi survey IPP target 3,50 terealisasi 3,61 dengan capain 103,14% (sudah memenuhi target).Untuk meningkatkan nilai IPP pada tahun 2023 akan dilakukan beberapa alternatif perbaikan pada beberapa aspek penilaian IPP yaitu: Aspek Kebijakan Pelayanan • Informasi SKM agar dipublikasikan diarea ruang pelayanan, media informasi, media sosial dan media cetak Aspek Profesionalisme SDM • Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoing dan peningkatan kinerja pelayanan. • Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama. Aspek Sarana dan Prasarana • Direncanakan pada PAK 2023 akan dilaksanakan pembangunan sarana parkir khusus pelayanan. Konsultasi dan Pengaduan • Arsip proses konsuktasi terdokumentasi dan mudah diakses di website, dokumen/arsip lainnya http://sukmasantri.jombangkab.go.id/login/survey/ZWZncEx3cW5UWUJyZ1c3ek1ZR2RVUT09 
							PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
4	Tindakanjut pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28.850.000	28.850.000	100,00%	Laporan pelanggaran rutin dilaporkan tepat waktu ke OPD terkait	Laporan bulanan ketentraman dan ketertiban rutin dikirimkan ke Satpol PP Jombang rutin setiap bulan, untuk kasus trantibum yang perlu penanganan dan tindakanjut langsung telah dikoordinasikan dengan SKPD terkait penyelesaian permasalahan 

5	Pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.500.000	3.500.000	100,00%	Desa telah melaporkan pertanggungjawaban APBDes Tahun 2022 (LRA beserta Perdesnya)	Telah dikoordinasikan dengan desa-desa dan Kasi Pemerintahan agar desa-desa segera melaporakan pertanggungjawaban APBDes tahun 2022 (LRA beserta perdesnya) 1. Rapat Pembinaan Penyusunan 2. Pertanggungjawaban APBDes Pertanggungjawaban APBDes yang telah terkumpul dari 15 Desa
6	Evaluasi Raperdes APBDesa/ Perubahan APB Desa Tepat waktu	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.594.000	40.594.000	100,00%	Raperdes 2023 sudah ditetapkan menjadi Perdes	Pada tahun 2023 Raperdes 2023 telah ditetapkan menjadi Perdes APBDes Tahun 2023

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN I	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI		
1	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.755.553.535	2.312.026.921	83,90%	Rata-rata capaian Capaian kinerja pegawai Kec. Tembelang adalah 100%	Untuk monitoring dan evaluasi kinerja telah rutin dilaksanaka setiap tribulan. Telah dilaksanakan rapat koordinasi penetapan target 2023 dan evaluasi kinerja tahun 2023

2	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	81	97,14	119,92	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.100.000	2.100.000	100,00%	Hasil penilaian PATEN Tahun 2023 Kec. Tembelang adalah 97,14 dengan tingkat capaian 119,92	Melakukan supervisi terhadap peningkatan nilai PATEN dengan bebarapa strategi sebagai berikut: 1. Penambahan sarana dan prasarana pendukung PATEN seperti Jalur disabilitas dan Paten (sudah dianggarkan pada PAPBD 2023) 
3	Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%	3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.655.000	22.642.000	99,94%	Telah dilaksanakan kegiatan PHBN HUT RI Tanggal 17 Agustus 2023	Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan peringatan HUT RI mulai dari tahap pembentukan panitia PHBN, persiapan pelaksanaan upacara dan lomba, pelaksanaan upacara dan lomba serta evaluasi dan pembubaran panitia PHBN  

4	Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Pelaksanaan rapat koordinasi Forkopicam dilakukan setiap tribulan	Pada tribulan 4 telah dilaksanakan rapat kordinasi forkopimcam (Polsek, Koramil dan Kecamatan terkait kegiatan pembagian bantuan sosial)
5	Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28.850.000	28.850.000	100,00%	Telah dilakukan deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Dilakukan deteksi dini potensi pelanggaran perda dan gangguan trantibum, koordinasi permasalahan, strategi, evaluasi serta tindak lanjutnya dengan instansi terkait secara berkala
6	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100%	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.500.000	3.500.000	100,00%	Mengevaluasi pelaksanaan APBDes SMT 2 Tahun 2022 melalui tinjau lapang dan dokumen pertanggungjawaban	Mengkoordinasikan dengan kasi Tata Pemerintahan untuk dilaksanakan pendampingan penyusunan pertanggungjawaban tahun 2022

7	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				yang telah disusun	
8	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100%	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.594.000	40.594.000	100,00%	Raperdes tahun 2023 telah ditetapkan menjadi Perdes APBDes	Mengkoordinasikan penyusunan Raperdes APBDes Th. 2023 
9	Koordinasi dan pembinaan lembaga/ badan usaha Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	30 lembaga	30 lembaga	100%		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Lembaga/Badan Usaha PMD yang aktif adalah PKK dan BUMDes (30 lembaga)	Mengkoordinasikan dengan DPMPD, TP-PKK Kab dan Kasi PMD terkait pembinaan TP-PKK dan BUMDes 

ATASAN LANGSUNG

SUGIYAT, S.Sos, M.Psi.T

Jombang, 15 Januari 2024
CAMAT TEMBELANG

AGUS SANTOSO, S.Sos
Pembina
NIP. 197303291992031001



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
INSPEKTORAT

Jl. Gatot Subroto 169 Jombang Tlp. (0321) 861424 Faks. (0321) 861424
JOMBANG

Jombang, 23 Agustus 2023

Kepada

Nomor : X.700/578/415.15/2023 Yth. Sdr. Camat Tembelang
Sifat : Penting di
Lampiran : 1 (satu) berkas **TEMBELANG**
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi SAKIP pada
Kecamatan Tembelang
Tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2023

Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Tembelang Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
- h. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

- i. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/445/415.10.1.3/2022 tentang tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023;
- j. Surat Tugas Bupati Jombang Nomor : 094/0660/415.15/2023 tanggal 31 Mei 2023.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sedangkan secara khusus tujuan evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup, antara lain :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;

- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Kecamatan Tembelang

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Tembelang memperoleh nilai sebesar 72,99 % dengan kategori (BB) Sangat Baik.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan OPD Kecamatan Tembelang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)	Skor per komponen*)
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,34	84,46	BB
2	Pengukuran Kinerja	30%	21,92	73,06	B
3	Pelaporan Kinerja	15%	6,89	45,95	D
4	Evaluasi Kinerja	25%	18,84	75,36	B
Total		100%	72,99		

*) Skor per komponen merupakan predikat berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021

(Dalam point 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas Kinerja Instansi)

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya telah seluruhnya ditindaklanjuti oleh Kecamatan Tembelang sehingga sudah mulai ada perbaikan-perbaikan dalam implementasi SAKIP meskipun peningkatannya belum maksimal.

9. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Kondisi Evaluasi

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 25,34 dari bobot 30% atau dengan capaian 84,46% (BB) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria telah terpenuhi seluruhnya (100%) sesuai dengan mandat kebijakan. Namun masih terdapat catatan yang perlu diperhatikan yaitu pada:

- a) Target pada indikator sasaran Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada Kecamatan Tembelang kurang realistis. Indeks Pelayanan Publik (IPP) tiap tahunnya mempunyai target tinggi (tahun 2021 dengan target 3,4 dan tahun 2022 dengan target 3,45), namun realisasinya pada tahun 2022 dengan poin 2,47 jauh di bawah target serta mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 dengan poin 2,883. (2.03.04)
- b) Semua pegawai telah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), namun berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Kabupaten Jombang, belum seluruhnya pegawai mampu memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 21,92 dari bobot 30% atau dengan capaian 73,06% (B) yang berarti bahwa kualitas kriteria sebagian besar telah terpenuhi (>75% - 100%), dan masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

- a) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan sebagaimana penggunaan aplikasi TPP melalui e- office kabupaten, namun berdasarkan rekapitulasi penilaian kinerja pegawai yang dilampirkan dalam rangka pemberian *reward* dan *punishment* tidak didapati dasar dan perhitungan yang jelas pada Indikator Nilai Sinergitas dan Disiplin Kinerja. (2.03.04)
- b) Berdasarkan survey dari Bagian Organisasi Kabupaten Jombang didapati bahwa pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi tindak lanjut unit kerja terhadap pembenahan yang harus dilakukan.
- c) Setiap ASN telah membuat SKP mulai dari Pimpinan tertinggi sampai dengan staf, namun berdasarkan survey dari Bagian Organisasi Kabupaten Jombang didapati bahwa pegawai pada unit kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja pengukuran kinerja.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 6,89 dari bobot 15% atau dengan capaian 45,95% (D) yang berarti bahwa kualitas kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai terpenuhi (>25%-50%) dan terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah: (2.03.04)

- a) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja namun belum memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan yaitu belum menyajikan efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana, hanya menyajikan efisiensi sumber daya keuangan/anggaran. (2.03.04)
- b) Dokumen laporan kinerja belum menginfokan secara rinci dan selaras terhadap upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja atas hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja.
- c) Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan untuk dasar dilakukan penyesuaian anggaran, karena dalam penyesuaian anggaran hanya didasarkan pada adanya kebijakan dari pemerintah. Sedangkan adanya target kinerja yang telah tercapai di awal tidak dijadikan dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran. (2.03.04)

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 18,84 dari bobot 25% atau dengan capaian 75,38% (B) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%), namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah: (2.03.04)

- a) Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai, karena seluruh tim evaluasi internal belum mendapatkan bimbingan teknis evaluasi SAKIP, evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. (2.03.04)
- b) Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja pada poin perencanaan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja. (2.03.04)
- c) Informasi mengenai kinerja belum memenuhi kriteria sebagai informasi yang andal, yaitu belum memenuhi kriteria berdasarkan sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten). Pada dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Tembelang belum menjelaskan sumber data yang valid terhadap tabel- tabel capaian kinerja. Selain itu juga belum memenuhi kriteria dapat diverifikasi, yakni bukti pendukung pada dokumen Monev Renaksi Tribulan I 2023 belum sepenuhnya menggambarkan tindak lanjut yang dilakukan Kecamatan Tembelang dalam mencapai kinerja. (2.03.04)

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Camat Tembelang Kabupaten Jombang, agar: (06)

1. Dalam menetapkan target kinerja terutama pada Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebaiknya memenuhi kriteria realistis dengan mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua staf terkait sasaran, indikator, dan target kinerja yang akan dicapai dan melengkapi dengan bukti dukung yang memadai sehingga diharapkan semua staf memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
3. Melakukan perbaikan pada SK *Reward* dan *Punishment* dengan menambahkan dasar perhitungan yang jelas terhadap indikator penilaian seperti Nilai Sinergitas dan Disiplin Kinerja
4. Menambah informasi efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai dalam laporan kinerja.
5. Menambahkan informasi secara rinci dan selaras terhadap upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja atas hambatan- hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja
6. Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja OPD serta penyesuaian aktivitas dalam rencana aksi.
7. Mengusulkan untuk mengikuti bimbingan teknis terkait evaluasi SAKIP bagi anggota tim evaluasi SAKIP internal sehingga terdapat peningkatan kompetensi evaluator SAKIP Internal.
8. Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama penyesuaian aktivitas dalam rencana aksi dan penetapan target kinerja.
9. Memperbaiki dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Tembelang dengan menjelaskan sumber yang valid terhadap tabel- tabel capaian kinerja dan untuk kedepannya agar melengkapi bukti pendukung Monev Renaksi serta dokumen capaian kinerja lainnya yang sepenuhnya menggambarkan tindak lanjut dalam mencapai kinerja.

1. Penutup

a. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Tembelang yang meliputi 4 (empat) komponen penilaian diketahui masih terdapat skor per komponen yang masih kurang

yaitu pada Pelaporan Kinerja dengan skor D yang berarti bahwa kualitas kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai terpenuhi (>25%-50%).

- b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

Berdasarkan simpulan di atas maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada periode berikutnya khususnya pada komponen pelaporan kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja pada Kecamatan Tembelang untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dan koreksi.

Kami menghargai upaya dari seluruh jajaran pegawai dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kecamatan Tembelang.

Mengetahui,

INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG


ABDURRAHMAN NINDAYAGUNG, SH, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19570105 198212 1 001

Tim Evaluasi,

Penanggung Jawab Pembantu


ANIS ZUL HULAIFAH, S. STP., M.M.

Pengendali Teknis


TUTUK MAHMUDAH, S.E.

Ketua Tim


ALBERTUS TMS YOTAN M., S.Sos

Anggota Tim,

1. EYRILLYA RACHMATIKA, A.Md. 

2. ILHAM ZAKARIA, A.Md. T. 

3. SABRINA AINUN NASRI, A.Md. Ak. 



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/ 350 /415.10.1.3/2023
TENTANG
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023
BUPATI JOMBANG,

Merimbang : a. bahwa untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, telah dilaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di unit Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang;

b. bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai dasar evaluasi atas pelayanan publik yang telah diberikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 798);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023.

KEDUA : Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud Dalam KESATU dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Penyelenggara	IDM Unit	Nilai Layanan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83,55	Baik
2	Dinas Kesehatan	84,45	Baik
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84,31	Baik
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	87,95	Baik
5	Dinas Sosial	85,87	Baik
6	Dinas Tenaga Kerja	93,63	Sangat Baik
7	Dinas Perhubungan	81	Baik
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	87,32	Baik
9	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	78,79	Baik

No	Unit Penyelenggara	IKM Unit	Mutu Layanan
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	86,57	Baik
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	84,98	Baik
12	Dinas Peternakan	88,94	Sangat Baik
13	Dinas Pertanian	85,77	Baik
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	87,64	Baik
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85,48	Baik
16	Dinas Lingkungan Hidup	84,16	Baik
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	88,22	Baik
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90,66	Sangat Baik
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	86,02	Sangat Baik
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90,56	Sangat Baik
21	Satuan Polisi Pamong Praja	82,92	Baik
22	Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang	88,01	Baik
23	Inspektorat Kabupaten Jombang	83,54	Baik
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	84,87	Baik
25	Badan Pendapatan Daerah	86,11	Baik
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	89,81	Sangat Baik
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85,99	Baik
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	88,31	Sangat Baik
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	88,80	Sangat Baik
30	RSUD Jombang	85,97	Baik
31	RSUD Ploso	83,36	Baik
32	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang	91,29	Sangat Baik
33	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana	85,53	Baik
34	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger	77,09	Baik
35	Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan	83,70	Baik
36	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	88,59	Sangat Baik

No	Unit Penyelenggara	IKM Unit	Mutu Layanan
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	81,48	Baik
38	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	88,59	Sangat Baik
39	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	82,46	Baik
40	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	85,50	Baik
41	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	98,99	Sangat Baik
42	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	92,28	Sangat Baik
43	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	89,55	Sangat Baik
44	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	90,31	Sangat Baik
45	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	89,43	Sangat Baik
46	Kecamatan Bandarkedungmulyo	99,13	Sangat Baik
47	Kecamatan Bareng	93,44	Sangat Baik
48	Kecamatan Diwek	94,67	Sangat Baik
49	Kecamatan Gudo	93,38	Sangat Baik
50	Kecamatan Jogoroto	96,58	Sangat Baik
51	Kecamatan Jombang	93,14	Sangat Baik
52	Kecamatan Kabuh	99,57	Sangat Baik
53	Kecamatan Kesamben	90,27	Sangat Baik
54	Kecamatan Kudu	95,37	Sangat Baik
55	Kecamatan Megaluh	99,34	Sangat Baik
56	Kecamatan Mojoagung	98,15	Sangat Baik
57	Kecamatan Mojowarno	94,52	Sangat Baik
58	Kecamatan Ngoro	92,08	Sangat Baik
59	Kecamatan Ngusikan	97,81	Sangat Baik
60	Kecamatan Perak	94,39	Sangat Baik
61	Kecamatan Peterongan	98,44	Sangat Baik
62	Kecamatan Plandaan	97,78	Sangat Baik
63	Kecamatan Ploso	98,57	Sangat Baik
64	Kecamatan Sumobito	91,99	Sangat Baik
65	Kecamatan Tembelang	95,36	Sangat Baik
66	Kecamatan Wonosalam	85,82	Baik

No	Unit Penyelenggara	IKM Unit	Mutu Layanan
67	Puskesmas Bandarkedungmatoyo	81,43	Baik
68	Puskesmas Bawang	90,31	Sangat Baik
69	Puskesmas Berangan	87,48	Baik
70	Puskesmas Blimbing Gudu	89,19	Sangat Baik
71	Puskesmas Blimbing Kesamben	81,61	Baik
72	Puskesmas Brambang	79,54	Baik
73	Puskesmas Cukir	89,91	Sangat Baik
74	Puskesmas Dukuhklopo	91,04	Baik
75	Puskesmas Gambiran	88,37	Sangat Baik
76	Puskesmas Jalen	85,95	Baik
77	Puskesmas Japenon	87,96	Baik
78	Puskesmas Jarak Kulon	85,85	Baik
79	Puskesmas Jatiwates	87,74	Baik
80	Puskesmas Jelakumba	85,05	Baik
81	Puskesmas Jogonaloyo	85,85	Baik
82	Puskesmas Kabuh	85,59	Baik
83	Puskesmas Kebon	97,45	Sangat Baik
84	Puskesmas Kesamben	89,28	Sangat Baik
85	Puskesmas Kesamben Ngern	93,90	Sangat Baik
86	Puskesmas Mayangan	93,26	Sangat Baik
87	Puskesmas Megaluh	87,20	Baik
88	Puskesmas Mojogung	91,18	Sangat Baik
89	Puskesmas Mojowarno	97,24	Sangat Baik
90	Puskesmas Perak	85,60	Baik
91	Puskesmas Petrongan	88,25	Baik
92	Puskesmas Plandaan	84,86	Baik
93	Puskesmas Plumbon Gombang	80,55	Baik
94	Puskesmas Publor	89,61	Sangat Baik
95	Puskesmas Pulorejo	81,43	Baik
96	Puskesmas Sumahito	89,69	Sangat Baik
97	Puskesmas Tambakrejo	87,27	Baik
98	Puskesmas Tapen	83,99	Baik
99	Puskesmas Tembelang	88,90	Sangat Baik
100	Puskesmas Wonosalam	82,55	Baik
	IKM Kabupaten Jombang	86,38	Sangat Baik

METHOD

Kepatuhan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditertarikan di Jember

Paula Garriga 25 October 2003

P. BUPATI JOMBANG,

[Signature]

NOTAT



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4/45/~~446~~ /415.10.1.3/2023
TENTANG
INDEKS PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengetahui tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dilaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap penerapan standar pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Jombang;
 - b. bahwa monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan untuk mengukur pelaksanaan standar pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Jombang;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);

Memperhatikan: Berita Acara Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor: 065/1075/415.10.3.3/2023, tanggal 9 November 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023.

KEDUA : Indeks Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Penyelenggara	IPP	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,2	(B-) Baik dengan Catatan
2	Dinas Kesehatan	3,48	(B-) Baik dengan Catatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3,87	(B) Baik
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	3,99	(B) Baik
5	Dinas Sosial	4,23	(A-) Sangat Baik
6	Dinas Tenaga Kerja	4,28	(A-) Sangat Baik
7	Dinas Perhubungan	2,77	(C) Cukup
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,45	(B-) Baik dengan Catatan
9	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3,25	(B-) Baik dengan Catatan
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3,44	(B-) Baik dengan Catatan
11	Dinas Ketahanan Pangan dan	4,24	(A-) Sangat Baik

No	Unit Penyelenggara	IPP	Keterangan
12	Dinas Peternakan	3,94	(B) Baik
13	Dinas Pertanian	3,71	(B) Baik
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3,75	(B) Baik
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,74	(B) Baik
16	Dinas Lingkungan Hidup	4,20	(A-) Sangat Baik
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,43	(A-) Sangat Baik
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,91	(B) Baik
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,08	(B-) Baik dengan Catatan
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,42	(A-) Sangat Baik
21	Satuan Polisi Pamong Praja	3,06	(B-) Baik dengan Catatan
22	Sekretariat DPRD	2,60	(C) Cukup
23	Inspekturat	2,20	(C-) Cukup dengan Catatan
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,79	(C) Cukup
25	Badan Pendapatan Daerah	3,73	(B) Baik
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3,38	(B-) Baik dengan Catatan
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,88	(C) Cukup
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,51	(C) Cukup
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,99	(B) Baik
30	RSUD Jombang	4,80	(A) Pelayanan Prima
31	RSUD Ploso	4,32	(A-) Sangat Baik
32	Kecamatan Blandakbedungwulye	3,48	(B-) Baik dengan Catatan
33	Kecamatan Berrng	3,35	(B-) Baik dengan Catatan
34	Kecamatan Dwek	3,10	(B-) Baik dengan Catatan
35	Kecamatan Gudo	3,53	(B) Baik
36	Kecamatan Jagroto	2,80	(C) Cukup

No	Unit Penyelenggara	IPP	Keterangan
37	Kecamatan Jombang	3,25	(B-) Baik dengan Catatan
38	Kecamatan Kalibah	3,31	(B-) Baik dengan Catatan
39	Kecamatan Kesamben	3,79	(B) Baik
40	Kecamatan Kudu	3,58	(B) Baik
41	Kecamatan Megaluh	3,44	(B-) Baik dengan Catatan
42	Kecamatan Mojoagung	3,74	(B) Baik
43	Kecamatan Mojowarno	3,42	(B-) Baik dengan Catatan
44	Kecamatan Ngora	3,26	(B-) Baik dengan Catatan
45	Kecamatan Ngusikan	2,75	(C) Cukup
46	Kecamatan Perak	2,45	(C-) Cukup dengan Catatan
47	Kecamatan Pterongan	3,25	(B-) Baik dengan Catatan
48	Kecamatan Plandaan	2,95	(C) Cukup
49	Kecamatan Ploso	3,16	(B-) Baik dengan Catatan
50	Kecamatan Sumobito	3,08	(B-) Baik dengan Catatan
51	Kecamatan Tembelang	3,61	(B) Baik
52	Kecamatan Wonosalam	3,86	(B) Baik
53	PT. BPR Bank Jombang (Persero)	2,84	(C) Cukup
54	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana	2,96	(C) Cukup
55	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger	2,58	(C) Cukup
56	Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan	2,38	(C-) Cukup dengan Catatan
57	Sekretariat Daerah	4,04	(A-) Sangat Baik
58	Puskesmas Bandarkedungmulyo	3,49	(B-) Baik dengan Catatan
59	Puskesmas Barend	4,10	(A-) Sangat Baik
60	Puskesmas Berangan	3,58	(B) Baik
61	Puskesmas Blimbing Gudo	2,70	(C-) Cukup dengan Catatan
62	Puskesmas Blimbing Kesamben	2,74	(C-) Cukup dengan Catatan
63	Puskesmas Brambang	3,22	(B-) Baik dengan Catatan

No	Unit Penyelenggara	IPP	Keterangan
64	Puskesmas Cukir	3,43	(B-) Baik dengan Catatan
65	Puskesmas Dukuhkipo	2,90	(C) Cukup
66	Puskesmas Gambiran	3,82	(B) Baik
67	Puskesmas Jabon	3,29	(B) Baik
68	Puskesmas Japaran	3,94	(B) Baik
69	Puskesmas Jarak Kulon	3,41	(B-) Baik dengan Catatan
70	Puskesmas Jatiwates	2,29	(C-) Cukup dengan Catatan
71	Puskesmas Jelakombo	2,73	(C) Cukup
72	Puskesmas Joplojo	2,72	(C) Cukup
73	Puskesmas Kabuh	2,91	(C) Cukup
74	Puskesmas Keboan	3,06	(B-) Baik dengan Catatan
75	Puskesmas Kesamben	3,95	(B) Baik
76	Puskesmas Kesamben Ngoro	3,02	(B-) Baik dengan Catatan
77	Puskesmas Mayangan	3,98	(B) Baik
78	Puskesmas Megaluh	3,35	(B-) Baik dengan Catatan
79	Puskesmas Mojoagung	2,95	(C) Cukup
80	Puskesmas Mojowarno	4,09	(A-) Sangat Baik
81	Puskesmas Perak	3,07	(B-) Baik dengan Catatan
82	Puskesmas Peterongan	4,09	(A-) Sangat Baik
83	Puskesmas Plandaan	2,29	(C-) Cukup dengan Catatan
84	Puskesmas Plumbon Gajahang	2,01	(C-) Cukup dengan Catatan
85	Puskesmas Pulokor	3,44	(B-) Baik dengan Catatan
86	Puskesmas Pulorejo	3,97	(B) Baik
87	Puskesmas Sumobito	3,62	(B) Baik
88	Puskesmas Tambakrejo	3,91	(B) Baik
89	Puskesmas Tapan	3,36	(B-) Baik dengan Catatan
90	Puskesmas Tembelang	3,97	(B) Baik
91	Puskesmas Wonmalam	3,63	(B) Baik
	IPP KABUPATEN JOMBANG	3,39	(B-) Baik dengan Catatan

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 17 Desember 2023
B. BUPATI JOMBANG.



SUGIAT

DAFTAR LAPORAN KEJADIAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

MATAN : TEMBELANG
: Oktober 2023

KEJADIAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
Pencurian			
Perampokan			
Pembunuhan			
Penganiayaan ringan / berat			
Penipuan			
Pemerasan			
Pelanggaran Lalu Lintas			
Kebakaran			
Sengketa Tanah			
Unjuk rasa			
Perjudian			
Gangguan lain			
- Tenggelam di sungai			
- Bunuh diri / Penemuan Mayat			
- KDRT / Pencabulan			
- Perusakan			
- Banjir Bandang			
- Putting Belung			
- Sambar Petir			

NIHIL NIHIL



DAFTAR LAPORAN KEGIATAN OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

MATAN : TEMBELANG

UN : Oktober 2023

KEJADIAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
Operasi Kenakalan Remaja			
Operasi Gepeng dan Anjal			
Operasi PSK			
Operasi Reklame			
Operasi PNS	NIHIL	NIHIL	
Operasi Patas			
Operasi Lainnya			
Pelanggaran IMB			
Pelanggaran Ijin Usaha / HO			
Pelanggaran Sepadan Jalan			
Pembangunan Tower			
Pelanggaran Lainnya			



DAFTAR LAPORAN KEJADIAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

MATAN : TEMBELANG

NOVEMBER 2023

KEJADIAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
Pencurian			
Perampokan			
Pembunuhan			
Penganiayaan ringan / berat			
Penipuan			
Pemerasan			
Pelanggaran Lalu Lintas			
Kebakaran			
Sengketa Tanah			
Unjuk rasa			
Perjudian			
Gangguan lain			
- Tenggelam di sungai			
- Bunuh diri / Penemuan Mayat			
- KDRT / Pencabulan			
- Perusakan			
- Banjir Bandang			
- Putting Beliang			
- Sambar Petir			

NIHIL NIHIL



DAFTAR LAPORAN KEGIATAN OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

MATAN : TEMBELANG

UN : NOVEMBER 2023

KEJADIAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
Operasi Kenakalan Remaja			
Operasi Gepeng dan Anjal			
Operasi PSK			
Operasi Reklame			
Operasi PNS			
Operasi Patas			
Operasi Lainnya			
Pelanggaran IMB			
Pelanggaran Ijin Usaha / HO			
Pelanggaran Sepadan Jalan			
Pembangunan Tower			
Pelanggaran Lainnya			

NIHIL NIHIL

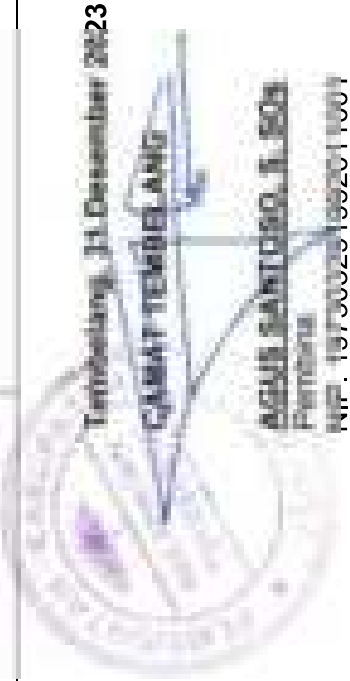


DAFTAR LAPORAN KEJADIAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

MATAN : TEMBELANG
N : DESEMBER 2023

KEJADIAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
Pencurian			
Perampokan			
Pembunuhan			
Penganiayaan ringan / berat			
Penipuan			
Pemerasan			
Pelanggaran Lalu Lintas			
Kebakaran			
Sengketa Tanah			
Unjuk rasa			
Perjudian			
Gangguan lain			
- Tenggelam di sungai			
- Bunuh diri / Penemuan Mayat			
- KDRT / Pencabulan			
- Perusakan			
- Banjir Bandang			
- Putting Beliang			
- Sambar Petir			

NIHIL NIHIL



DAFTAR LAPORAN KEGIATAN OPERASI DAN PELANGGARAN PERDA

MATAN : TEMBELANG

UN : DESEMBER 2023

KEJADIAN	JUMLAH	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
Operasi Kenakalan Remaja			
Operasi Gepeng dan Anjal			
Operasi PSK			
Operasi Reklame			
Operasi PNS			
Operasi Patas			
Operasi Lainnya			
Pelanggaran IMB			
Pelanggaran Ijin Usaha / HO			
Pelanggaran Sepadan Jalan			
Pembangunan Tower			
Pelanggaran Lainnya			

NIHIL NIHIL



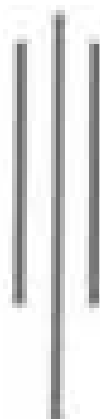


Pemerintahan Kabupaten Jombang
Kecamatan Tembelang
Desa Pulorejo

Kode pos 61452

PERATURAN DESA PULOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023



DESA PULOREJO

KECAMATAN TEMBELANG
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024



**KEPALA DESA PULOREJO
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA PULOREJO
NOMOR : 1 TAHUN 2024**

T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOREJO,

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dan menetapkan dengan Peraturan Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
12. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
13. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan ~~Anggaran~~ Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 82/A);